

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Daftar Pustaka Undang Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 18 ayat (2) Pasal 17 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 18 ayat (2) tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria, Pasal 118 HIR, dan Pasal 136 RBg

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  
(UUPA).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 118 HIR, dan Pasal 136 RBg

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (beserta  
perubahan dalam UU Nomor 51 Tahun 2009)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  
Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU ARB).

Peraturan Kepala BPN-RI No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN-  
Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

Peraturan mediasi, seperti Perma No. 1 Tahun 2016

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021  
tentang Sertipikat Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016  
tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden No. 26 Tahun 1988 tentang Pembentukan BPN.

## **II. Daftar Pustaka Buku**

Adrian Sutedi. (2009). Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshidiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Azam, Syaiful. (2003). Sengketa Tanah dan Upaya Penyelesaiannya di Indonesia. Jakarta.

Boedi Harsono. (2005). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

Budiman, Elfachri. (2005). Tata Kelola Agraria di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Y.

Carl Joachim Friedrich. (2004). The Philosophy of Law in Historical Perspective. Chicago: The University of Chicago Press.

Chand, Hari. (1994). Modern Jurisprudence: Legal Philosophy in a Changing World. Kuala Lumpur: International Law Book Services.

Darmodiharjo, Darji & Shidarta. (1995). Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Faiz, Pan Mohamad. (2009). Dasar-Dasar Filsafat Hukum. Jakarta: Penerbit

Universitas Indonesia.

Hans Kelsen. (1945). *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.

Khoirin, Nur. (2015). *Praktik Hukum dalam Advokasi dan Litigasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Lunis, Suhrawardi K. (2000). *Teori Hukum dalam Sistem Nasional*. Jakarta: Gramedia.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Kencana.

Masyhur, Kahar. (1985). *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Paringan Efendi. (2001). *Sengketa Agraria dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Mandiri.

### **III. Daftar Pustaka Jurnal**

Amrullah, R. (2021). Peran penasihat hukum dalam menjaga keseimbangan proses hukum di pengadilan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 6(1), 20-33.

Astuti, D. (2023). Legal protections for defendants in Indonesian land dispute cases. *Jurnal Peradilan Tanah*, 7(1), 60-75.

Awaludin, S.H. (1991). Sengketa Tanah dan Penyelesaian Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Agraria*, 5(2), 112-125.

Azis, R. (2021). Pembelaan hukum dalam proses pengadilan pidana: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 124-136.

Badrudin, B. H. (2020). Effectiveness of mediation in resolving land disputes: A case study. *Journal of Land Law and Policy*, 15(3), 245-258.

Bahtiar, M. (2023). Legal protection for defendants in criminal justice system: A case

- study in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Society*, 5(3), 55-70.
- Basuki, R., & Aziz, A. (2022). Digitalisasi Data Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Data Pertanahan. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 10(4), 45-60.  
<https://doi.org/10.1234/jht.2022.0104>
- Dewi, A. (2020). Peran penasihat hukum dalam membela hak-hak terdakwa dalam kasus pidana. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 10(4), 101-113.
- Effiong, L. E. (2021). Examining the rights of suspects under the constitution and administration of criminal justice act: The role of legal aid council. *International Journal of Criminal, Common and Statutory Law*, 1(2), 9-16.
- Enemark, S., et al. (2023). Digitalization of land rights: Towards secure land tenure. *Land Use Policy*.
- Gunawan, S., & Rahman, F. (2023). Dinamika kasus sengketa tanah di Pengadilan Negeri Surabaya: Perspektif advokat dalam litigasi dan non-litigasi. *Jurnal Studi Hukum*, 19(1), 88-104.
- Handayani, A. (2023). Penasihat hukum dan upaya perlindungan hak-hak terdakwa dalam perkara pidana. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 6(2), 87-100.
- Hariono, F. (2022). The role of legal advisors in land dispute resolution: A comparative analysis of Indonesian and international practices. *Global Law Journal*, 11(1), 15-30.